

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan aspek terpenting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pembangunan nasional. Perubahan lapangan industri dan perdagangan merupakan salah satu penyebab dari adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah maupun wilayah, sedangkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam satu tahun merupakan pendapatan nasional. (Luki Diktio A, 2016).

Indikator alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang mantap, adil, dan merata. Tetapi pada realita yang ada, pembangunan selama ini selalu mengedepankan pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan mengabaikan esensi kesejahteraan itu sendiri, yakni pemerataan antara wilayah dan distribusi spasial atas sumber daya.

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB, sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkali menjadi ukuran kesuksesan

suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Potensi daerah yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi. Selain itu, efek lain dari pengelolaan yang baik dan optimal yaitu pemerataan pendapatan nasional masyarakat. Tingkat kesejahteraan daerah tersebut dapat dilihat dari pemerataan pendapatan masyarakatnya.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumberdaya yang ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan suatu daerah itu harus mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Sehingga penelitian tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. (Arsyad, 1999).

Otonomi daerah menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Harapan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri untuk terus membangun daerahnya dengan konsekuensi,

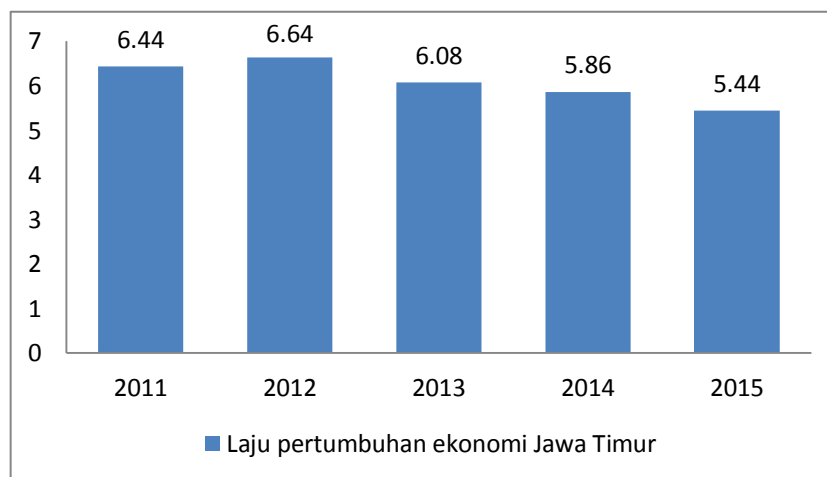
pemerintah daerah beserta perangkatnya harus ikut bekerja keras agar mampu mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi.

Peran pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah menjadi semakin besar. Peran yang diikuti dengan tantangan dan tuntutan tersebut dapat membangun daerah yang sesuai dengan corak daerahnya. Namun dari pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat sekaligus menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang diinginkan.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata yang tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Suatu sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhannya sangat lamban akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya, jika sektor yang memiliki kontribusi yang besar terhadap totalitas pembangunan serta diikuti dengan pertumbuhan yang cepat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Besarnya angka PDRB yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis kontribusi. Kemajuan ekonomi suatu wilayah dengan wilayah lainnya dapat berbeda, karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut, dan adanya kecenderungan penanaman modal oleh investor pada wilayah yang sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan sumber daya manusia yang sudah terampil, dan terpusat pada pemerintahan atau kota.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik dengan mengandalkan sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari besarnya sumbangan industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 dengan 5,44 persen.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2011-2015 (persen)



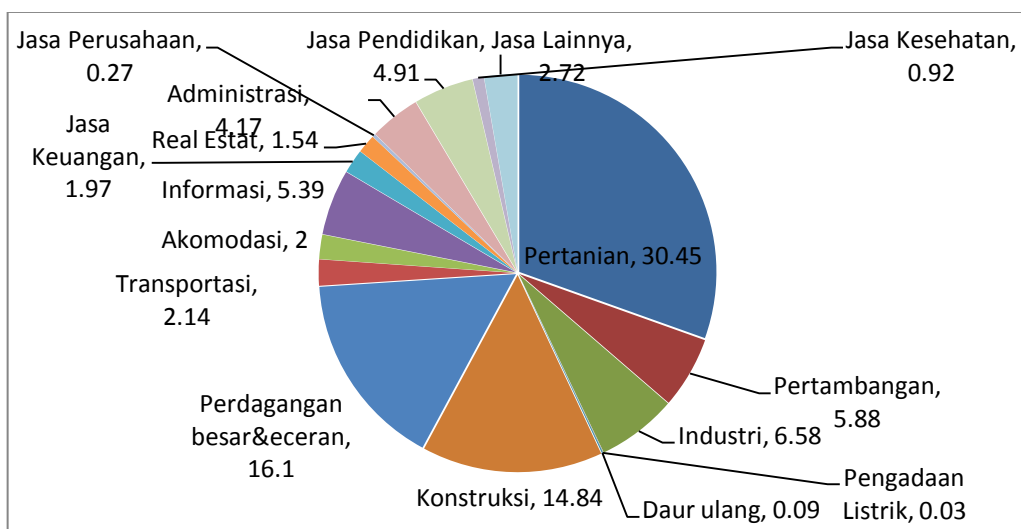
Sumber : BPS Jawa Timur, 2015

Berdasarkan pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung melambat. Di tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,44 persen, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2012 yaitu menjadi 6,44 persen. Tetapi, pada tahun 2013, 2014, dan 2015, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang berturut-turut menjadi 6,08 persen, 5,86 persen dan 5,44 persen. Faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi diantaranya karena kondisi ekonomi global yang belum membaik, menurunnya harga komoditas internasional, ketidakpastian pasar keuangan, depresiasi nilai tukar, serta menurunnya daya beli

masyarakat. Jawa Timur mempunyai 38 Kabupaten/Kota dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 1.389,87 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 550.986 jiwa pada tahun 2015. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki suatu kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan baik untuk mengelola, merencanakan, dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah secara optimal sehingga untuk hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Dengan luas wilayah yang dimiliki, Kabupaten Pacitan termasuk dalam wilayah atau daerah agraris.

Gambar 1.2
Kontribusi Kategori/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2015

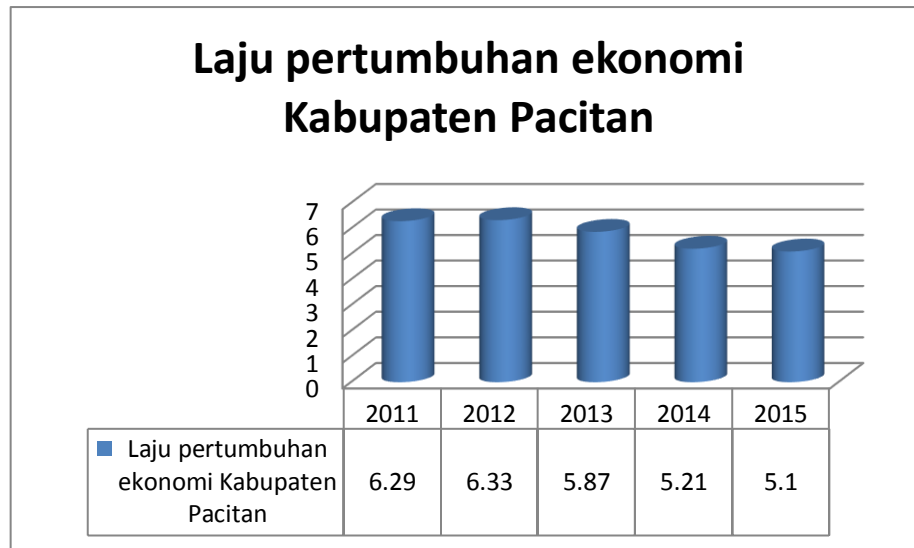


Sumber : BPS Kabupaten Pacitan, 2015

Dalam gambar 1.2 menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai sumbangan atau berkontribusi besar terhadap PDRB unggulan di Kabupaten Pacitan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tahun 2014 saja, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 30,45 persen terhadap PDRB di Kabupaten Pacitan. Kemudian penyumbang kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 16,1 persen. Selanjutnya urutan ketiga adalah kategori konstruksi sebesar 14,84 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terkecil yaitu kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,09 persen dan kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03 persen.

Sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pacitan, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mampu menyerap tenaga kerja terbanyak 201.770 jiwa atau sekitar 57,69 persen dari total penduduk yang bekerja (*Sakernas, Agustus 2015*). Dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar, serta didukung luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 80 persen dari total luas wilayah. Meningkatnya harga produk pertanian yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir mampu membuat kategori ini makin meningkat perannya. (pacitankab.bpd.go.id)

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2011-2015 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Pacitan, 2015

Berdasarkan data pada gambar 1.3, secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2011-2012 cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada dua tahun tersebut mengalami percepatan dari 6,29 persen pada tahun 2011, kemudian menjadi 6,33 persen pada tahun 2012. Sedangkan mulai tahun 2013-2015 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,87 persen pada tahun 2013, 5,21 persen pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 lebih menurun menjadi 5,1 persen. Hal ini dapat disebabkan karena berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (BI rate), selain itu bisa juga karena kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Kabupaten Pacitan memiliki potensi yang sangat besar, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya harus optimal dan baik, sehingga akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga. Dalam hal ini, perlunya suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektorekonomilain yang berpotensi supaya lebih berkembang untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pacitan sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Sehingga pembangunan ekonomi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan atas latar belakang diatas maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengembangan Pembangunan Daerah Berbasis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015)**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah yang luas maka penelitian ini hanya mengkaji dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 sampai dengan 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Sektor apakah yang memiliki potensi sebagai sektor basis, memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing di Kabupaten Pacitan ?
2. Sektor manakah yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan di Kabupaten Pacitan ?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor yang memiliki potensi sebagai sektor basis, memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki daya saing di Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui sektor apa yang yang sangat berpotensi untuk memacu pengembangan pembangunan di Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mengambil kebijakan dalam perencanaan pengembangan suatu daerah serta perekonomian daerah.

2. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan dan perkembangannya.

3. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai sarana penerapan teori-teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan.